

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Strategi Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa study kasus pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia periode Tahun 2018. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2014:53) yaitu: “Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).” Data yang dihasilkan berupa angka-angka (kuantitatif) dan berupa paragraf penjelasan dari angka (kuantitatif) tersebut.

Sugiyono (2016:10-11) lebih menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif, yakni sebagai berikut: “Seperti telah dikemukakan, dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari obyek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrumen untuk mengukurnya.” Menurut Moh. Nazir (2011:54) metode penelitian deskriptif yakni sebagai berikut: “Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Data Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Populasi penelitian menurut Sugiyono (2017:136) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja yang ada di Badan Kepegawaian Negara RI. Adapun sampel penelitian menurut Sugiyono (2017:137) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini sampel penelitiannya adalah Inspektorat, Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara, Biro Umum dan Biro Keuangan dengan pertimbangan bahwa sampel penelitian ini dianggap telah mewakili kriteria fungsi dalam organisasi yang ingin diteliti, yaitu kriteria fungsi pengawasan yang diwakili oleh Inspektorat, kriteria fungsi teknis yang diwakili Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara dan kriteria administrasi yang diwakili oleh Biro Keuangan.

Metode pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representative* (Sugiyono,2010).

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder, menurut Sugiyono (2017:104) dalam bukunya “Metode Penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif” bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen pendukung yang didapat pada saat melakukan validasi penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah di BKN Tahun 2018. Dokumen-dokumen tersebut berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Peraturan peraturan dan Kebijakan-kebijakan Kepala BKN, notulensi atau dokumen terkait yang menjelaskan SOP atau kebijakan tersebut telah disosialisasikan, dokumen pendukung yang menjelaskan bahwa SOP tersebut telah

diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala, dan aplikasi yang digunakan untuk memantau secara real time atas implementasi kebijakan/aturan tersebut.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari wawancara serta analisis dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini bersifat menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Kepegawaian Negara dengan cara menilai maturitas SPIP berdasarkan instrumen penilaian sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perka BPKP) Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Adapun informan yang diwawancara sebagai berikut:

No	Initial Nama	Unit Kerja
1	Bapak D.J	Inspektorat
2	Bapak M.T	Direktorat Kinerja Aparatur Negara
3	Bapak A.S	Biro Umum
4	Bapak K.L	Biro Keuangan

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, apa yang akan diteliti oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan Operasional variabel diperlukan untuk mengubah masalah yang diteliti ke dalam bentuk variabel, kemudian menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait

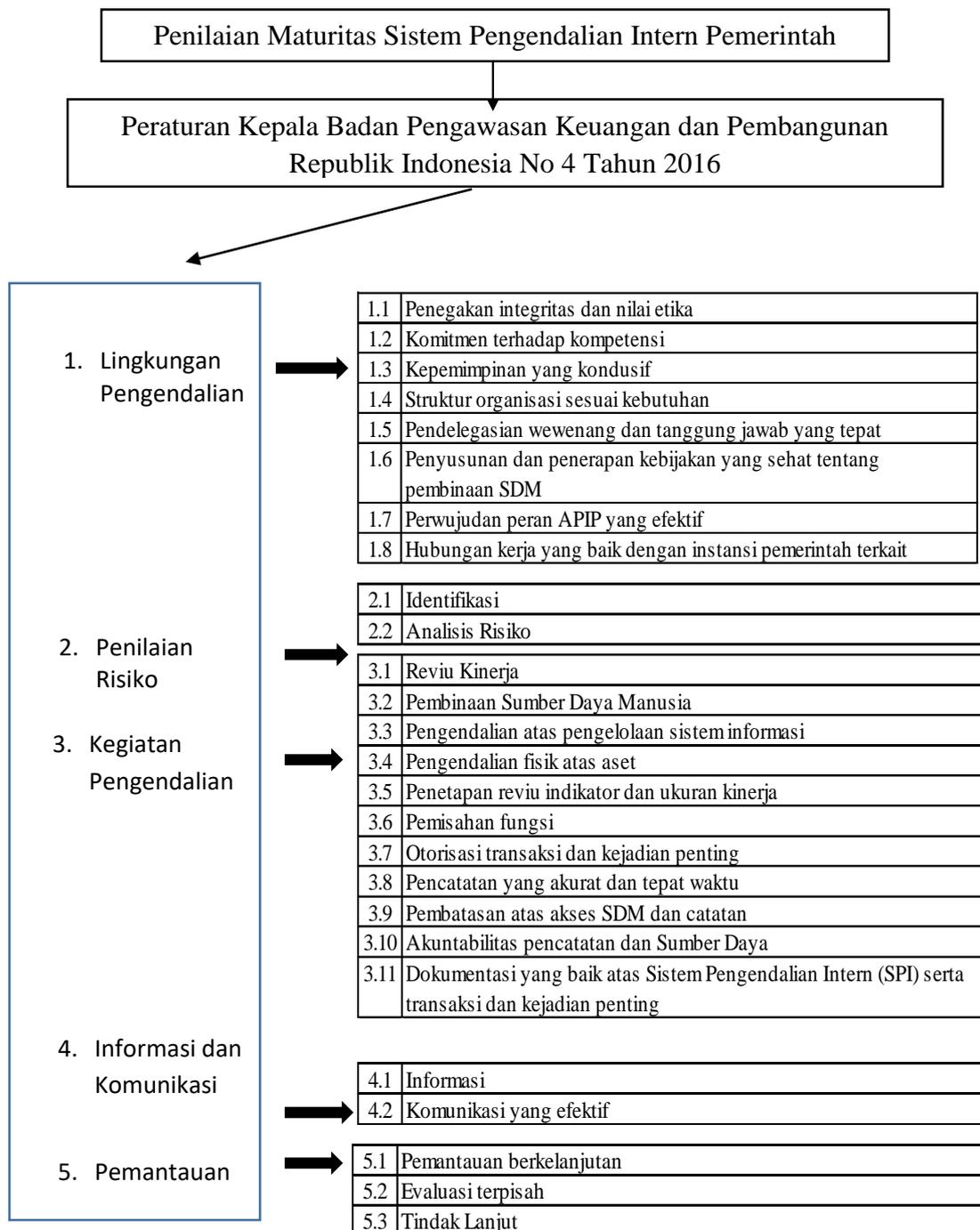
Variabel dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 terdiri dari 5 unsur yaitu

- 1) Lingkungan Pengendalian yaitu kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern
- 2) Penilaian Risiko, kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
- 3) Kegiatan Pengendalian, yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- 4) Informasi dan Komunikasi,
Yang dimaksud dengan “informasi” adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Yang dimaksud dengan “komunikasi” adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik
- 5) Pemantauan, yaitu proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Adapun Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah penilaian kematangan dari penerapan Sistem Pengendalian Internnya yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar dibawah ini :



Gambar 3.1 Operasionalisasi Variabel

Secara keseluruhan terdapat lima fokus penilaian yang tersebar ke dalam 25 sub unsur SPIP menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 seperti yang terlihat dalam table 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
	I.LingkunganPengendalian (X1)		
1	Integritas dan Nilai Etika	Ada atau tidaknya Kebijakan/ Standard Operating Procedure (K/SOP) tentang Aturan Perilaku.	0 atau 1
		Belum atau sudahnya dikomunikasikan Kebijakan mengenai aturan perilaku kepada seluruh pegawai.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen penerapan sanksi disiplin yang tepat terhadap pelanggaran Aturan Perilaku.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen evaluasi terhadap pedoman Aturan Perilaku.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Sistem terkait Penegakan Integritas dan Nilai Etika telah terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.	0 atau 1
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai standar kompetensi untuk seluruh jabatan.	0 atau 1
		Sudah/ belumnya disosialisasikan kebijakan mengenai standar kompetensi untuk seluruh posisi jabatan dalam entitas organisasi.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen atas pertimbangan pimpinan mengenai kompetensi teknis/ manajerial pegawai dalam penempatan pada suatu formasi jabatan, sesuai dengan kebijakan/prosedur yang berlaku.	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		Ada atau tidaknya dokumen hasil evaluasi berkala atas pemberlakuan kebijakan/ prosedur tentang standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya sistem/database kompetensi pegawai yang diimplementasikan dan terintegrasi sebagai mekanisme perencanaan/ pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan penempatan/ penetapan formasi jabatan untuk seluruh posisi jabatan.	0 atau 1
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Ada atau tidaknya dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai sistem manajemen kinerja, misalnya Prosedur SAKIP.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya media/dokumen sosialisasi mengenai kebijakan/ prosedur sistem manajemen kinerja kepada seluruh level pimpinan unit entitas organisasi.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen/laporan akuntabilitas kinerja yang didukung dengan sumber data kinerjanya.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan kebijakan/ prosedur tentang sistem manajemen kinerja.	0 atau 1
		Adanya sistem berbasis aplikasi komputer sebagai mekanisme penerapan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan.	0 atau 1
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	Ada atau tidaknya dokumen Struktur Organisasi dan tata laksananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen sosialisasi mengenai Stuktur Organisasi beserta tata laksananya kepada seluruh level pimpinan unit	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		entitas dan pegawai yang berkepentingan.	
		Ada atau tidaknya dokumen kebijakan/prosedur yang memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam entitas.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan Struktur Organisasi entitas K/L/P secara berkala.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya program aplikasi sebagai sarana pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan tugas setiap level pimpinan dan pegawai sesuai uraian tugasnya	0 atau 1
5	Pendelegasian Wewenang	Ada atau tidaknya prosedur pendelegasian wewenang yang mengatur antara lain: 1. Surat pendelegasian wewenang secara formal yang ditandatangani pejabat yang memberikan delegasi 2. Dokumen pendelegasian formal 3. Laporan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen pengkomunikasian prosedur pendelegasian wewenang kepada seluruh level pimpinan unit entitas dan pegawai yang berkepentingan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen yang menjelaskan bahwa pendelegasian wewenang telah dilaksanakan sesuai prosedur.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen hasil evaluasi secara berkala atas prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, termasuk mekanismenya	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengembangan berkelanjutan terhadap prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
6	Pembinaan SDM yang Sehat	Ada atau tidaknya kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	0 atau 1
		Ada atau tidaknya implementasi pembinaan SDM (rekrutmen s.d. pemberhentian) yang telah diimplementasikan di unit kerja sesuai kebijakan/aturannya.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi terhadap kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Program aplikasi komputer/web (database kepegawaian) yang memungkinkan pemantauan pemenuhan standar kompetensi dan keterkaitan hak/kewajiban dengan reward/punishment	0 atau 1
7	Perwujudan Peran APIP	Ada atau tidaknya satuan pengawasan intern (inspektorat/inspektorat jenderal) yang memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pemberian keyakinan yang memadai atas	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja oleh inspektorat/itjen	
		Ada atau tidaknya evaluasi atas hasil kinerja pengawasan inspektorat/itjen berupa penilaian internal dan eksternal (penelaahan sejawat oleh aparat pengawasan lain) dan hasilnya telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan keyakinan yang memadai	0 atau 1
		Ada atau tidaknya mekanisme pemantauan otomatis yang mampu memberikan upaya peringatan dini membantu organisasi/unit organisasi mengidentifikasi/ evaluasi exposure risiko; penjaminan melalui reuiu proses PBJ; evaluasi efektivitas pengendalian intern; reuiu system; reuiu kebenaran & ketepatan informasi keuangan & operasi; evaluasi pengamanan asset; reuiu efisiensi & kehematan penggunaan Sumber Daya	0 atau 1
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Ada atau tidaknya Keputusan pimpinan Kementerian tentang kegiatan saling uji/ rekonsiliasi data	0 atau 1
		Ada atau tidaknya sosialisasi perihal kegiatan saling uji/ rekonsiliasi data	0 atau 1
		Ada atau tidaknya implementasi dari kebijakan berupa pelaksanaan rekonsiliasi dengan kementerian terkait melalui rapat koordinasi/ rekonsiliasi, Hasil rekonsiliasi realisasi anggaran, LK triwulanan/semesteran, hasil reuiu internal LK	0 atau 1
		Ada atau tidaknya :Laporan Evaluasi berkala atas pedoman/kebijakan	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		Ada atau tidaknya program aplikasi pemantauan secara otomatis terhadap implementasi kebijakan	0 atau 1
	II. Penilaian Risiko (X2)		
1	Identifikasi Risiko	Ada atau tidaknya pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pengaturan penilaian risiko pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen/bukti bahwa pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) atau kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan (misalnya berupa SE, memo, ND dari Pimpinan).	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen berupa Daftar Risiko atas kegiatan utama.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi terhadap pedoman penilaian risiko/kebijakan penilaian risiko dan daftar risiko	0 atau 1
		Ada atau tidaknya aplikasi untuk memantau pemutakhiran daftar risiko.	0 atau 1
2	Analisis Risiko	Ada atau tidaknya pedoman penilaian risiko (analisis risiko) termasuk pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen/bukti bahwa pedoman / kebijakan penilaian risiko (analisis risiko) telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai (misalnya berupa Surat Edaran (SE), memo, Nota Dinas (ND) dari Pimpinan).	0 atau 1
		Adanya rencana tindak pengendalian (RTP) /rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		formal oleh pimpinan organisasi/ unit-organisasi	
		Adanya evaluasi terhadap pedoman/kebijakan penilaian risiko (analisis risiko) rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko	0 atau 1
		Adanya aplikasi komputer/web untuk memantau pemutakhiran RTP/rencana penanganan risiko	0 atau 1
	III. Kegiatan Pengendalian(X3)		
1	Reviu Kinerja	Ada atau tidaknya dokumen penetapan kinerja organisasi dan unit organisasi/ unit kerja unit kerja (PK/Tapkin) tahunan dan atau triwulanan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengkomunikasian dokumen penetapan kinerja organisasi dan unit organisasi/unit kerja kepada seluruh pegawai yg berkepentingan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Laporan kinerja triwulanan organisasi/unit org/unit kerja. Pastikan bahwa laporan kinerja tersebut mengukur pencapaian kinerja berdasarkan dokumen PK/Tapkin.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Laporan Evaluasi atas pedoman reviu kinerja dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja	0 atau 1
		Terdapat aplikasi realtime yang saling terintegrasi atas kinerja yang dapat digunakan untuk pemantauan berkelanjutan	0 atau 1
2	Pembinaan SDM	Ada atau tidaknya SOP terkait pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja).	0 atau 1
		Ada atau tidaknya dokumen yang menunjukkan pengomunikasian kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan standar kinerja	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan dari	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		target kinerja pada renstra, bukti pemetaan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana strategis.	
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pedoman/kebijakan/SOP Pembinaan SDM	0 atau 1
		Ada atau tidaknya program aplikasi pemantauan secara terintegrasi terkait pembinaan SDM	0 atau 1
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	Ada atau tidaknya Kebijakan dan SOP yang memuat pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengomunikasian Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Pelaksanaan pengendalian umum sistem informasi	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas kebijakan terkait pengendalian umum dan pengendalian aplikasi	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Sistem terkait Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi yang terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat	0 atau 1
4	Pengendalian Fisik	Ada atau tidaknya aturan terkait dengan pengamanan aset dari pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengomunikasian aturan pengamanan aset	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengamanan BMN/D sesuai aturan pengamanan aset	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas kebijakan	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		dan pelaksanaan pengamanan BMN/D	
		Ada atau tidaknya Program Aplikasi computer yg online, yang memantau aset	0 atau 1
5	Penetapan dan Reviu Indikator	Ada atau tidaknya IKU (indikator Kinerja Utama) organisasi dan unit organisasi/ unit kerja	0 atau 1
		Ada atau tidaknya bukti pengkomunikasian IKU	0 atau 1
		Ada atau tidaknya bukti pengukuran kinerja organisasi/unit org/ unit kerja menggunakan IKU	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas IKU	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengembangan berkelanjutan atas IKU	0 atau 1
6	Pemisahan Fungsi	Ada atau tidaknya pemisahan tanggung jawab dan tugas secara formal	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengomunikasian kebijakan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya bukti Pemisahan tanggung jawab dan tugas yg efektif/ sesuai ketentuan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pemisahan tanggung jawab dan tugas	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pemantauan secara otomatis dan terintegrasi terhadap pemisahan fungsi dan tanggungjawab	0 atau 1
7	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	Ada atau tidaknya aturan/pedoman/SOP yg memuat otorisasi atas transaksi	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengomunikasian aturan/pedoman/ SOP otorisasi transaksi	0 atau 1
		Ada atau tidaknya bukti penerapan otorisasi transaksi	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala atas kebijakan/SOP terkait Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting dan implementasinya	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		Ada atau tidaknya pengembangan terus menerus berupa pemantauan otomatis dan terintegrasi atas aturan dan pelaksanaan otorisasi transaksi	0 atau 1
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	Ada atau tidaknya aturan/pedoman tentang kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian penting	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengomunikasian aturan/pedoman pencatatan transaksi dan kejadian penting	0 atau 1
		Ada atau tidaknya bukti pencatatan transaksi dan kejadian penting secara akurat (termasuk pengklasifikasian transaksi) dan tepat waktu	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pemantauan otomatis/online atas pencatatan transaksi dan kejadian penting	0 atau 1
9	Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan	Ada atau tidaknya pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan kepada pegawai yg berwenang yg ditetapkan secara formal	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengomunikasian pembatasan akses atas sumber daya dan catatan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya bukti bahwa akses atas sumber daya dan catatan hanya dilakukan pegawai yang berwenang	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala dan terdokumentasi Tahund pembatasan akses atas sumber daya dan catatan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya system yang telah terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	Ada atau tidaknya keberadaan penanggung jawab atas pencatatan dan sumber daya.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengomunikasian penetapan penanggung jawab pencatatan dan barang	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pertanggungjawaban atas pencatatan dan sumber daya	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas akuntabilitas/ pertanggungjawaban pencatatan dan sumber daya	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pemantauan otomatis/ online atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya	0 atau 1
11	Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern	Ada atau tidaknya kebijakan/ aturan/ SOP untuk melakukan dokumentasi atas implementasi /penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting,	0 atau 1
		Adanya pengomunikasian kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting	0 atau 1
		Adanya bukti penerapan kebijakan/aturan/ SOP pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting	0 atau 1
		Adanya bukti evaluasi berkala dan terdokumentasi atas kebijakan/aturan/ SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting.	0 atau 1
		Adanya pemantauan otomatis/ online atas kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting	

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
	IV. Informasi dan Komunikasi(X4)		
1	Informasi	Ada atau tidaknya spesifikasi kebutuhan Informasi SPIP ditetapkan secara formal (Infokom masuk dalam dokumen Renstra dan RKT unit organisasi yang bersangkutan)	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengkomunikasian kebijakan/prosedur atau pedoman infokom/kehumasan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat/ pegawai yang berkepentingan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya mekanisme pengolahan data menjadi informasi rinci dan sesuai untuk semua tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi berkala atas kebijakan dan SOP infokom	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pemantauan secara otomatis dimana sistem telah terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.	0 atau 1
2	Komunikasi	Ada atau tidaknya notulen, kick off, pakta integritas, pencaanangan arahan Pimpinan tentang tanggungjawab pengendalian intern.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pengkomunikasian kebijakan/prosedur atau pedoman tersebut	0 atau 1
		Ada atau tidaknya penyiapan berbagai bentuk sarana komunikasi yang disediakan oleh pimpinan, baik untuk internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		Ada atau tidaknya evaluasi atas kebijakan/ SOP/pedoman tersebut secara berkala dan terdokumentasi	0 atau 1
		Ada atau tidaknya sistem yang terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat..	0 atau 1
	V. Pemantauan(X5)		
1	Pemantauan berkelanjutan	Ada atau tidaknya kebijakan/SOP pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan pemantauan berkelanjutan guna mengendalikan pencapaian tujuan.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya strategi untuk melakukan komunikasi kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya implementasi pemantauan berkelanjutan yang dilakukan setiap level pimpinan organisasi atas efektivitas kegiatan pengendalian pada tingkat entitas dan tingkat kegiatan (seluruh kegiatan) dengan melibatkan manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pemantauan berkala yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reuiu dan evaluasi khusus.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Sistem terkait kebijakan/SOP Pemantauan Berkelanjutan yang terintegrasi dan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.	0 atau 1
2	Evaluasi Terpisah	Adanya kebijakan/ SOP untuk melakukan kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk	0 atau 1

No	Variabel/Dimensi	Indikator	Nilai
		melaksanakan tindak lanjut temuan audit	
		Adanya kegiatan sosialisasi dan media untuk komunikasi kegiatan evaluasi terpisah dan tindak lanjut temuan audit	0 atau 1
		Ada atau tidaknya pemanfaatan penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya evaluasi secara berkala yang dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intern secara memadai.	0 atau 1
		Ada atau tidaknya Sistem terkait kebijakan/SOP Evaluasi Terpisah dan tindak lanjut temuan telah terintegrasi yang menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya pemantauan berkelanjutan dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat..	0 atau 1

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data menurut Hasan (2006: 35) adalah : “memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya. Kejadian dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner dan bantuan wawancara”

Analisis Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penilaian memiliki bobot yang berbeda-beda dengan rincian di Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Bobot Fokus Penilaian (Sub Unsur/Dimensi)

NO	Variabel	Jumlah Bobot Variabel	Jumlah Indikator	Jumlah Dimensi	Bobot Per Dimensi
1	Lingkungan pengendalian	30%	40	8	3,75%
2	Penilaian risiko	20%	10	2	10%
3	Kegiatan pengendalian	25%	55	11	2,27%
4	Informasi dan Komunikasi	10%	10	2	5%
5	Pemantauan	15%	10	2	7,5%
	Jumlah	100%		25	

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP

. Tabel 3.3 Tabel Penilaian Skor Maturitas

Variabel/Dimensi		Bobot	Total Skor Indikator	Capaian Skor Maturitas
		a	b	axb
Lingkungan Pengendalian(X1)				
1	Integritas dan Nilai Etika	3,75%	0 s.d 5	
2	Komitmen terhadap Kompetensi	3,75%		
3	Kepemimpinan Kondusif	3,75%		
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75%		
5	Pendelegasian Wewenang	3,75%		
6	Pembinaan SDM yang Sehat	3,75%		
7	Peran APIP yang efektif	3,75%		
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	3,75%		
Penilaian Risiko(X2)				
1	Identifikasi Risiko	10%		
2	Analisis Risiko	10%		
Kegiatan Pengendalian(X3)				
1	Reviu Kinerja	2,27%		
2	Pembinaan SDM	2,27%		
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%		
4	Pengendalian Fisik atas aset	2,27%		

Variabel/Dimensi		Bobot	Total Skor Indikator	Capaian Skor Maturitas
		a	b	axb
5	Penetapan reuiu indikator dan Indikator kinerja	2,27%		
6	Pemisahan Fungsi	2,27%		
7	Otorisasi transaksi dan Kejadian Penting	2,27%		
8	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	2,27%		
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27%		
10	Akuntabilitas dan Pencatatan Sumber Daya	2,27%		
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27%		
Informasi dan Komunikasi(X4)				
1	Informasi	5%		
2	Komunikasi yang efektif	5%		
Pemantauan(X5)				
1	Pemantauan berkelanjutan	7,5%		
2	Evaluasi Terpisah	7,5%		
total skor maturitas				

Langkah-langkah penilaian maturitas SPIP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Penilaian keseluruhan dari setiap komponen SPIP, memberikan skor 1 (satu) untuk kondisi ada dan skor 0 (nol) untuk kondisi tidak ada dari setiap capaian indikator(Tabel 3.1),
- 2) Setiap Dimensi dijumlah skor capaian dan menjadi penilaian setiap variabel, kemudian nilai dari penjumlahan capaian indikator dikalikan dengan bobot sub unsur(dimensi) masing masing dan menghasilkan total capaian score yang diperlihatkan dalam interval (Tabel 3.4). Adapun interval skor tingkat maturitas SPI adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5

Tabel 3.4 Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP

NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} \leq 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP

2 Tingkat Belum Ada.

Pada tingkat ini, organisasi sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.

1 Tingkat Rintisan

Pada tingkat ini organisasi telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya.

2 Tingkat berkembang.

Pada tingkat ini organisasi telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan Instansi menangani kelemahan tidak konsisten.

3 Tingkat Terdefinisi,

Pada tingkat ini organisasi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

4 Tingkat terkelola dan terukur

Pada tingkat ini organisasi telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi dilakukan secara formal dan terdokumentasi. Namun demikian, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.

5 Tingkat optimum

Pada tingkat ini organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (*self assessment*) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.